Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak (EKSAP)
Volume 2, Nomor 4, Tahun 2025
e-ISSN : 3046-8124; p-ISSN : 3046-8817, Hal. 137-146
DOI: https://doi.org/10.61132/eksap.v2i3.1313
Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/EKSAP

Green Corporate Governance sebagai Solusi dalam Meningkatkan Pengelolaan Risiko Keuangan: Studi pada Kantor Kecamatan Muara Enim, Sumatera Selatan

Rakha Maulana Saputra
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Alamat: Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
Email : rakhamaulana25@gmail.com

Abstract. *Global economic uncertainty has significantly impacted financial management, including within governmental institutions such as sub-district offices. This study aims to analyze how green corporate governance can serve as a solution to improve financial risk management at the Muara Enim Sub-District Office in South Sumatra. The research applies a qualitative explanatory approach using meta-analysis and focus group discussion (FGD) techniques. The findings reveal that economic uncertainty triggers high financial risks that cannot be adequately addressed through conventional good governance practices. Green corporate governance, with its sustainability orientation and strategic use of natural resources, emerges as an alternative solution to mitigate financial risk. Environmentally conscious governance practices, such as investment diversification based on local potential and waste management, have proven effective in enhancing financial stability and supporting domestic economic growth. This study recommends the implementation of green corporate governance as a policy approach that is adaptive to economic uncertainty and financial risk at the local government level.*

Keywords: *Green Corporate Governance, Financial Risk, Economic Uncertainty, Local Government, Muara Enim*

Abstrak. Ketidakpastian ekonomi global memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan, termasuk di institusi pemerintahan seperti kantor kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana green corporate governance dapat menjadi solusi dalam meningkatkan pengelolaan risiko keuangan di Kantor Kecamatan Muara Enim, Sumatera Selatan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif eksplanatori dengan teknik meta-analisis dan focus group discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian ekonomi memicu tingginya risiko keuangan yang tidak dapat ditangani secara optimal melalui praktik good governance konvensional. Green corporate governance, dengan orientasi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara strategis, mampu menjadi alternatif solusi dalam mengurangi dampak risiko keuangan. Penerapan tata kelola yang ramah lingkungan, seperti diversifikasi investasi berbasis potensi lokal dan pengelolaan sampah, terbukti mampu mendorong stabilitas keuangan serta mendukung peningkatan ekonomi domestik. Penelitian ini merekomendasikan implementasi green corporate governance sebagai pendekatan kebijakan yang adaptif terhadap ketidakpastian ekonomi dan risiko keuangan di tingkat pemerintahan lokal.

Kata kunci: *Green Corporate Governance, Risiko Keuangan, Ketidakpastian Ekonomi, Pemerintahan Daerah, Muara Enim*

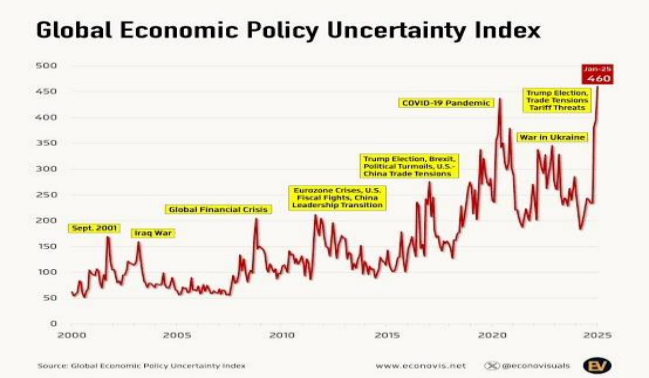
1. LATAR BELAKANG

Institusi pemerintahan memainkan peranan vital dalam berbagai aspek kehidupan di suatu negara, salah satunya adalah kantor kecamatan. Kantor kecamatan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kebijakan dan peraturan yang telah ada sehingga penyelenggaraan pemerintahan umum dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat umum. Salah satu peranan vital kantor kecamatan adalah melakukan pengelolaan keuangan desa, di mana kantor kecamatan memiliki tanggungjawab dalam memantau penggunaan dana desa dan mengelola aset desa yang tersedia.

Received: Mei 31, 2025; Revised: Juni 12, 2025; Accepted: Juni 26, 2025; Publish: Juli 08, 2025

Peranan tersebut membuat kantor kecamatan harus memastikan perencanaan anggaran keuangan yang efektif dan efisien sehingga tujuannya dapat tercapai. Pengelolaan keuangan dengan skala besar tentunya memiliki risiko yang sangat besar, utamanya di tengah ketidakpastian ekonomi yang terjadi, di mana hal tersebut dapat mengancam keuangan pemerintahan lokal dan pengelolaannya, sehingga defisiensi keuangan dapat terjadi di masa depan.

Ketidakpastian ekonomi yang melanda dunia saat ini memiliki kaitan dan hubungan yang erat dengan pengelolaan keuangan desa, utamanya pada kantor kecamatan. Ketidakpastian ekonomi yang terjadi saat ini dapat dilihat melalui gambar di bawah:



unia

Berdasarkan gambar 1.1. terlihat bahwa ketidakpastian ekonomi telah terjadi selama 5 tahun terakhir, di mana perang Ukraina dan perang dagang yang terjadi antara Cina dan Amerika setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden. Ketidakpastian ekonomi yang fluktuatif tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2025, di mana tahun 2025 pada kuarter pertama menjadi puncak fluktuasi ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ekonomi tersebut akibat dari perang dagang yang terjadi antara Amerika dan Cina, di mana kebijakannya mempengaruhi banyak aspek dalam ekonomi, utamanya keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Monica (2025) menemukan bahwa ketidakpastian ekonomi global meningkatkan risiko pengelolaan keuangan utamanya pada institusi pemerintahan. Sedangkan pendapat lainnya dijelaskan oleh Panggabean (2024) perubahan pasar akibat ketidakpastian ekonomi pengelolaan risiko keuangan yang muncul akibat ketidakpastisn ekonomi dunia harus dilakukan melalui strategi dan manajemen yang baik. Penelitian lainnya dilakukan oleh Severesia (2022) menemukan bahwa ketidakpastian ekonomi berdampak pada kesulitan dalam menghadapi pengelolaan keuangan. Kesulitan pengelolaan keuangan tersebut akan berdampak pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat apabila terjadi pada institusi pemerintahan utamanya kantor Kecamatan.

Ketidakpastian ekonomi dan pengelolaan risiko keuangan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan sehingga dibutuhkan solusi untuk menghadapi hal tersebut. Salah satu solusi yang dilakukan adalah good governance. Good governance adalah tata kelola yang dilakukan untuk menekankan pada pengelolaan yang bersifat efisiens, transparan, partisipatif, dan adil, di mana pengambilan keputusan dan pelaksanaan pemerintahan. Good governance dapat menjadi solusi dalam pengelolaan risiko keuangan pemerintahan, utamanya di desa seperti kantor kecamatan. Meskipun demikian, telah banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa good governance tidak cukup untuk meningkatkan pengelolaan risiko keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi yang saat ini berada di puncak fluktuasinya. Pattiasina (2022) menjelaskan bahwa good governance menjadi fondasi utama dalam menjalankan manajemen pemerintahan, namun masih kurang dalam meningkatkan pengelolaan risiko keuangan yang dapat berdampak pada keuangan kantor pemerintahan seperti kantor kecamatan. Sedangkan penelitian lainnya dilakukan oleh Budiharjo (2025) menjelaskan bahwa good governance hanya menjadi standar kontrol internal yang dilakukan sebagai pengawasan laporan keuangan yang dapat mencegah terjadinya deviasi. Budiharjo (2025) juga menyatakan bahwa good governance hanya meningkatkan performa keuangan pemerintahan daerah namun tidak cukup untuk meningkatkan pengelolaan risiko keuangan.

Pengelolaan risiko keuangan menjadi penting untuk diperhatikan, hal tersebut dikarenakan pengelolaan risiko keuangan dapat mengelola risiko yang dapat terjadi, di mana risiko tersebut dapat memengaruhi keuangan institusi. Pentingnya pengelolaan risiko keuangan dilakukan dengan tujuan untuk melindungi nilai uang, mengingat ketidakpastian ekonomi menyebabkan terjadinya potensi kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar, perubahan suku bunga, inflasi, dan kondisi ekonomi. Hal tersebut didukung oleh temuan Pandiangan (2025) yang menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi menyebabkan terjadinya inflasi dan kenaikan suku bunga yang berdampak pada keuangan perusahaan maupun institusi. Berdasarkan hal tersebut maka penting untuk menemukan solusi dalam meningkatkan pengelolaan risiko keuangan yang terjadi.

Observasi telah dilakukan di kantor kecamatan Muara Enim, Sumatera Selatan dan ditemukan bahwa belum ada solusi dan strategi yang dilakukan pihak kantor kecamatan dalam meningkatkan pengelolaan risiko keuangan. Hal tersebut juga terlihat dari Peraturan BPK no. 15 Tahun 2023 yang menjelaskan hanya pengelolaan keuangan tanpa mengelola risiko yang terjadi di masa depan. Hal tersebut juga tergambar dari PP/43/2014 pasal 154 (1) yang mengatur peranan camat dalam mengawasi keuangan desa, termasuk melakukan pengawasan

dan pembinaan pengelolaan risiko keuangan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah green Corporate governance yang dapat menjadi solusi dalam meningkatkan pengelolaan risiko keuangan.

Green corporate governance adalah sistem tata kelola perusahaan atau institusi yang berfokus pada keberlanjutan dengan memperhatikan lingkungan seperti penggunaan sumber daya alam. Belum ada penelitian yang menjabarkan secara langsung dampak green corporate governance dalam peningkatan pengelolaan risiko keuangan, namun green corporate governance dianggap dapat menjadi solusi dalam mengatasi pengelolaan risiko keuangan di tengah puncak fluktuasi ketidakpastian ekonomi yang terjadi belakangan ini. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini akan berfokus dalam mengkaji bagaimana green corporate governance dapat menjadi solusi dalam meningkatkan pengelolaan risiko keuangan di kantor kecamatan Muara Enim Sumatera Selatan. Penelitian ini berfokus pada strategi dan manajemen pengelolaan risiko keuangan menggunakan green corporate governance dalam mengatasi risiko keuangan yang disebabkan oleh inflasi, kenaikan suku bunga, anjloknya rupiah, dan menguatnya mata uang asing yang memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa utamanya di kantor kecamatan. Arafah (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa green corporate governance memberikan integritas bagi perusahaan dan kemandirian dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan. Penelitian lainnya yang ditemukan oleh Wandasari (2012) bahwa green accounting memiliki dampak yang signifikan terhadap performa keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Green Corporate Governance

Konsep green corporate governance berangkat dari kebutuhan institusi untuk tidak hanya mengedepankan tata kelola yang baik, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dalam pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, pendekatan ini mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dengan perhatian terhadap pelestarian lingkungan dan optimalisasi sumber daya alam (Li et al., 2018). Implementasi green governance menekankan bahwa keberlanjutan dan kinerja keuangan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pengelolaan institusi, termasuk di sektor publik, dituntut untuk merancang kebijakan yang ramah lingkungan agar dapat mengantisipasi potensi risiko jangka panjang.

Sejalan dengan temuan Chairina dan Tjahjadi (2023), keberhasilan pelaporan berkelanjutan erat kaitannya dengan komitmen terhadap prinsip tata kelola yang bersifat ekologis. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan hanya tanggung jawab sektor privat, tetapi juga relevan dalam manajemen pemerintahan. Dalam konteks ini, green corporate governance berfungsi bukan hanya sebagai alat pengawasan internal, tetapi juga sebagai strategi perlindungan terhadap volatilitas ekonomi.

B. Manajemen Risiko Keuangan

Risiko keuangan muncul akibat ketidakseimbangan antara perencanaan dan realisasi dalam aktivitas keuangan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Dalam konteks sektor publik, risiko ini dapat berupa kegagalan dalam pengalokasian anggaran, kesalahan investasi, hingga defisit akibat fluktuasi ekonomi. Menurut Wandasari et al. (2012), tata kelola yang tepat menjadi dasar dalam mempertahankan stabilitas keuangan, termasuk dalam menghadapi risiko yang bersumber dari perubahan nilai tukar, inflasi, atau suku bunga.

Pentingnya pemahaman terhadap manajemen risiko juga ditekankan oleh Fatoni (2022), yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi yang tidak stabil cenderung memperbesar tekanan terhadap sistem keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistematis yang tidak hanya berfokus pada pengendalian internal, melainkan juga mampu mengidentifikasi ancaman sejak dini dan menyusun respons strategis untuk mengurangi dampaknya.

C. Ketidakpastian Ekonomi dan Dampaknya terhadap Tata Kelola

Ketidakpastian ekonomi merupakan kondisi yang mempersulit lembaga dalam mengambil keputusan, terutama ketika informasi mengenai tren ekonomi bersifat tidak konsisten. Dalam situasi seperti ini, perencanaan anggaran dan strategi investasi publik menjadi lebih rentan terhadap kesalahan. Monica et al. (2025) menegaskan bahwa ketidakpastian global dapat memperparah ketidakseimbangan fiskal pada institusi pemerintahan. Hal ini didukung oleh temuan Severesia dan Juliana (2022), yang menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil risiko ketika kebijakan ekonomi berada dalam kondisi tidak menentu.

Di sisi lain, Budiharjo et al. (2025) menyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal dan kompetensi manajerial sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas keuangan di tengah situasi yang berubah cepat. Namun, pengawasan internal saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan pemahaman kontekstual terhadap dinamika ekonomi makro.

D. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan

Dalam ranah pemerintahan lokal, tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan bukan hanya sekadar pelaporan dan pencatatan, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap penggunaan dana secara tepat dan strategis. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 15 Tahun 2023, pengelolaan keuangan daerah memerlukan sistem dan prosedur yang mampu merespons potensi risiko secara adaptif. Hal ini mengindikasikan perlunya inovasi dalam pendekatan kebijakan fiskal, termasuk mengintegrasikan prinsip green governance sebagai upaya jangka panjang untuk menjaga kestabilan keuangan dan keberlanjutan pembangunan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama penelitian. Data pendukung lainnya didapatkan dari observasi yang dilakukan oleh peneliti di kantor kecamatan Muara Enim yang berlokasi di Sumatera Selatan. Eksplanatori digunakan pada penelitian ini untuk menjelaskan hubungan kausal yang terjadi antar variabel yang diteliti. Adapun alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah meta analisis, di mana meta analisis memungkinkan peneliti melakukan penggabungan dan penggunaan beberapa data, baik dara dari masa lampau maupun data sekarang. Keunggulan dilakukannya meta analisis adalah peneliti dapat mengkaji lebih dalam keterkaitan antar variabel, di mana penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel green corporate governance dan pengelolaan risiko keuangan. Teori yang menjadi pendukung penelitian ini adalah teori good enviromental governance dan manajemen risiko keuangan yang dapat menjelaskan penelitian secara mendalam dan detail.

Focus Group Diacussion

Focus group Diacussion adalah berupa sebuah diskusi kelompok yang dilakukan lebih dari 6 orang yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk membahas isu dan fenomena yang terjadi. FGD telah dirancang dengan berbagai metode untuk mendapatkan informasi tertentu seperti informasi penelitian. Pada penelitian ini, FGD menjadi salah satu bentuk riset peneliti, di mana riset sosial dilakukan dengan prosedur tertentu (Sugiyono, 2019). Adapun ciri dari penelitian FGD adalah diskusi yang terfokus dan terarah yang dilakukan dengan minimal 6 orang di dalamnya dengan membicarakan topik yang sudah ditentukan bersama pemateri dan narasumber. FGD sendiri merupakan diskusi formal yang materinya ditentukan oleh peneliti yang berlangsung selama 2 jam lamanya. Pengambilan data dilakukan dari hasil diskusi yang

kemudian dianalisis dan dijabarkan ke dalam hasil penelitian. FGD pada penelitian ini melibatkan peneliti sebagai penyelenggara dan perangkat kantor kecamatan Muara Enim Sumatera Selatan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Risiko Keuangan Kantor Kecamatan Muara Enim

Ketidakpastian ekonomi yang terjadi menyebabkan munculnya banyak risiko keuangan di masa depan bagi perusahaan, termasuk institusi pemerintahan seperti kantor kecamatan, sehingga perlu dilakukan strategi dan solusi untuk mengatasi risiko yang terjadi. Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan oleh peneliti bersama dengan kantor kecamatan dan menemukan bahwa pengelolaan keuangan kantor kecamatan memiliki risiko yang sangat besar, dikarenakan besarnya dana yang dikelola kemudian inflasi yang terjadi serta melemahnya mata uang rulgah. Hal tersebut menghambat performa keuangan yang memberikan efek buruk kepada keuangan kantor kecamatan Muara Enim. Risiko tersebut terjadi dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Namun hasil diskusi yang didapatkan ditemukan bahwa risiko terbesar berasal dari lingkungan eksternal yaitu ketidakpastian ekonomi yang terjadi. Hasil identifikasi yang ditemukan oleh peneliti bahwa seluruh staff kantor kecamatan Muara Enim merasa bahwa ancaman terbesar menimbulkan risiko yang menghambat perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pengawasan keuangan yang terjadi. Hasil penelitian menemukan bahwa dampak dari kurangnya pengelolaan risiko keuangan di kantor kecamatan Muara Enim menyebabkan terjadinya banyak investasi yang gagal serta kurangnya investasi asing yang diterima dikarenakan kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak mendukung adanya investasi asing. Investasi asing menjadi penting dilakukan dalam meningkatkan pengelolaan risiko keuangan yang terjadi. Masalah likuiditas juga banyak dialami oleh UMKM di Muara Enim akibat gagalnya pengelolaan risiko keuangan yang dilakukan oleh kantor kecamatan. Hal tersebut membuat bantuan dana kecamatan Muara Enim menjadi tidak maksimal dikarenakan rendahnya dana yang didapatkan akibat kegagalan dalam mengelola risiko keuangan kantor kecamatan. Banyaknya kegagalan investasi yang didapatkan dikarenakan risiko investasi yang salah dilakukan, di mana kantor kecamatan Muara Enim melakukan investasi pada instrumen yang salah seperti berinvestasi pada UMKM di tengah tidak mendukungnya ekonomi domestik. Ketidakpastian ekonomi yang terjadi juga menyebabkan banyaknya pengangguran sehingga perputaran ekonomi domestik menjadi tidak stabil sehingga menyebabkan peningkatan terhadap inflasi. Peningkatan terhadap inflasi

tersebut membuat performa keuangan desa menjadi semakin menurun sehingga dana desa mengalami defisit. Diversifikasi investasi juga tidak dilakukan yang menyebabkan risiko keuangan menjadi sangat tinggi yang berdampak pada penurunan kualitas keuangan kantor kecamatan Muara Enim. Teori manajemen risiko tidak diterapkan dengan baik dikarenakan minimnya pengetahuan yang dimiliki sehingga risiko keuangan terjadi lebih besar.

B. Green Corporate Governance dalam Meningkatkan Pengelolaan Risiko Keuangan

Good governance dibutuhkan dalam tata kelola pemerintahan, utamanya untuk meningkatkan pengelolaan risiko keuangan dan performa keuangan yang dimiliki institusi pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan good governance membuat tata kelola menjadi lebih baik melalui pertanggung jawaban terkait pengelolaan keuangan (Chairina & Tjahjadi, 2023). Good governance juga memainkan peran penting dalam peningkatan efektifitas pengelolaan risiko keuangan secara efektif dan efisien sehingga risiko keuangan dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi dapat diminimalisir. Good governance juga menjadi media pengambilan keputusan yang efektif dalam mengambil langkah strategis dalam mengurangi dampak risiko keuangan seperti kesalahan dalam berinvestasi yang disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi dunia (Mun et al., 2022). Kesalahan dalam mengelola risiko keuangan dapat memperburuk dampak yang ada seperti tingkat inflasi yang akan semakin tinggi. Salah satu metode terbaru yang dianggap efektif dalam meningkatkan pengelolaan risiko keuangan adalah green good governance (Li et al., 2018). Green good governance adalah tata kelola yang berfokus pada pemanfaatan lingkungan yang berkelanjutan. Pemanfaatan lingkungan yang dilakukan oleh kantor kecamatan Muara Enim dapat meminimalisir risiko keuangan yang terjadi di masa depan Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan teori good enviromental governance yang berfokus pada pemanfaatan lingkungan (Pandey, 2023). Muara Enim merupakan kabupaten di Sumatera Selatan yang memiliki kekayaan alam sehingga good enviromental governance dapat diterapkan dengan baik. Inflasi yang terjadi serta melemahnya mata uang rupiah dapat diminimalisir risikonya dengan berinvestasi pada lingkungan, di mana kekayaan alam Muara Enim dapat dimanfaatkan melalui kebijakan investasi pemerintah. Pemanfaatan lingkungan tersebut dapat dirawat dan dibangun infrastruktur yang memadai sehingga dapat menjadi objek wisata yang membuat perputaran ekonomi domestik menjadi meningkat (Fatoni, 2022). Peningkatan ekonomi domestik tersebut tentu dapat menekan risiko keuangan yang terjadi di kantor kecamatan Muara Enim Sumatera Selatan. Selain itu, pemerintah kecematan Muara Enim juga dapat memberdayakan masyarakat dengan mengatur ulang sampah yang kemudian dapat dijadikan sebagai komoditas yang membantu keuangan desa. Pemanfaatan lingkungan yang berkelanjutan dapat memberikan

dampak keuangan jangka panjang terhadap Muara Enim yang hanya dapat dilakukan melalui kebijakan kecamatan Muara Enim. Hal tersebut telah terbukti efektif dikarenakan relevan dengan isu dan fenomena yang terjadi. Pemanfaatan lingkungan yang baik juga dapat memberikan lahan untuk menanam komoditas yang harganya melonjak seperti cabe sehingga risiko keuangan dapat dikurangi dampaknya. Diversifikasi investasi menjadi kunci penting dalam green corporate governance, di mana diversifikasi investasi dapat dilakukan dengan pemanfaatan seluruh lingkungan dan alam yang dijaga dan dikelola dengan baik sehingga dapat menjadi komoditas yang memberikan fondasi utama dalam meningkatkan pengelolaan risiko keuangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Ketidakpastian ekonomi menyebabkan peningkatan risiko keuangan menjadi tantangan yang dihadapi oleh banyak perusahaan dan institusi termasuk institusi pemerintahan. Dampak inflasi dan melemahnya mata uang menjadi tidak terhindarkan sehingga membutuhkan tata kelola yang baik melalui good governance. Meskipun demikian, kantor kecamatan Muara Enim mengalamj penurunan pengelolaan risiko keuangan yang diterlihar melalui gagalnya banyak investasi yang dilakukan sehingga menyebabkan ekonomi domestik menjadi semakin sulit yang berdampak pada menurunnya performa keuangan yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut maka green good governance menjadi solusi dengan memanfaatkan alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Investasi yang dilakukan dapat dialihkan ke dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, alam dan lingkungan sehingga dapat dijadikan komoditas untuk meningkatkan performa keuangan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya risiko keuangan di masa depan. Pemanfaatan lingkungan melalui green good governance juga mempermudah pengawasan keuangan di Muara Enim Sumatera Selatan.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

Arafah, A., & Dewi, R. (2023). Pengaruh Kinerja Lingkungan, Green Corporate Governance, Leverage, Dan Investment Opportunity Set Terhadap Integritas Laporan Keuangan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol. *AKMEN: Jurnal Ilmiah*, *20*(1), 26–38. https://doi.org/10.37476/akmen.v20i1.3497

Budiharjo, R., Pratomo, D., & Hapsari, D. W. (2025). Local Government Financial Performance : Good Governance , the Efectiveness Internal Control and Competence. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan*, *10*(1), 125–138.

Chairina, C., & Tjahjadi, B. (2023). Green Governance and Sustainability Report Quality: The Moderating Role of Sustainability Commitment in ASEAN Countries. *Economies*, *11*(1). https://doi.org/10.3390/economies11010027

Fatoni, A. (2022). Pengaruh Ketidakpastian Ekonomi Terhadap Stabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(3), 2903. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5385

Li, W., Xu, J., & Zheng, M. (2018). Green governance: New perspective from open innovation. *Sustainability (Switzerland)*, *10*(11), 1–19. https://doi.org/10.3390/su10113845

Monica, S., Pratama, B. H., Putri, S. R., & Malik, A. (2025). Strategi Mengelola Utang di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global. *IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, *03*(01), 14–20.

Mun, H. W., Ni, K. X., Shan, L. H., & Wei, L. C. (2022). Green Economy and Good Governance Towards Income Equality: a Quantile Analysis. *Journal of Sustainability Science and Management*, *17*(9), 62–74. https://doi.org/10.46754/jssm.2022.09.005

Pandiangan, B. V. S., Apriyani, G., Sarah, S. S., & Siregar, S. R. (2025). Tingkat Bunga , Inflasi , dan Investasi : Hubungan dan Dampaknya dalam Perekonomian. MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi, 3(2), 44–52.

Panggabean, I. S., Hamidah, N., Ritonga, A. A., Lubis, P. K. D., & Sihombin, R. P. (2024). Analisis Manajemen Risiko Keuangan dan Tenaga Kerja pada UMKM Mie Ayam Mbak Yummi Kota Medan. Maeswara : *Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(3), 251–270. https://doi.org/10.61132/maeswara.v2i3.957

Pattiasina, V., Noch, M. Y., Rumasukun, M. R. R., Seralurin, Y. C., & Tamaela, E. Y. (2022). Moderating Effect of Good Governance on Determinants of the Quality Region Government Financial Reports. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(10), 3019–3033. https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i10.p09

Severesia, C., & Juliana, R. (2022). Pengaruh Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi Terhadap Pengambilan Risiko Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(3), 491–502. https://doi.org/10.17509/jrak.v10i3.43857

Wandasari, D., Nasution, Y. S. J., & Syafina, L. (2012). The Effect of Good Corporate Governance on the Financial Performance of Mining Companies in BEI. GEMA : *Jurnal Gentiaras Manajemen Dan Akuntansi*, 5(3), 1578–1600. https://doi.org/10.47768//gema.v15n2.202302

Artikel Prosiding

Pandey, C. L. (2023). *Green Governance for Sustainabiliy COVID-19 Multidisciplinary Narratives Contribution to Nepal ' s Foreign Affairs Executive Editors*. *June*.

Buku Teks

Sugiyono. (2019). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

Pemerintah Kabupaten Muara Enim. (2023). Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 15 Tahun 2023 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Bupati Muara Enim.